

Manajemen Pemerintah Kota Terhadap Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pekanbaru Tahun 2008-2012

AJENG PUSPITA NINGRUM

Dosen Pembimbing : Drs.H.Isril, MH

**Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

Phone/Fax : +62 (0)761, 63277

Website : <http://Fisip.Unri.ac.id>

Ajengpuspitan@yahoo.com

ABSTRACT

This research was motivated by the lack of green open space (RTH) in the city of Pekanbaru and not achieving the target of 30% non-compliance of green open space in accordance with the Law No. 26 Year 2007 on Spatial Planning.

The purpose of this penelitian to know how government management of Pekanbaru to the green open space in the city of Pekanbaru Year 2008-2012 and what factors influence that affects the city government in promoting green open space (RTH) in Pekanbaru.

Type of research method used was qualitative research can be said to be adequate to be applied. Understanding qualitative research can be defined as research that produces descriptive data about the words spoken or written, and the observable behavior of the people studied.

In explaining the research problems using the theory of Local Government Management G.R.Terry used to guide the research analysis. This study used informant informant as information objects that aim to achieve mastery in getting the information in this study. Types and sources of data used in this study is primary data and secondary data obtained through observation.

Based on the findings in this study that the Law No. 26 Year 2007 on Spatial Planning and Government Regulation No. 26 Year 2008 on National Spatial Plan requires City area has 30% green open space of the area of the city is, but in reality the City Pekanbaru Keith can meet the needs of green open space (RTH) is. This is because the factors that influence the management of the city government to green open space (RTH) is the following local government planning, organizing regional government institutions, the use of the resources of local government (personnel resources, natural resources, artificial resources, social resources, finance, and equipment), the supervision of the regional administration.

Keywords: Management, government, Green Open Space.

Manajemen Pemerintah Kota Terhadap Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pekanbaru Tahun 2008-2012

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kota Pekanbaru serta belum tercapainya tidak terpenuhinya target 30% Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana manajemen Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Pekanbaru Tahun 2008-2012 dan faktor apa saja yang mempengaruhi yang mempengaruhi pemerintah kota dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekanbaru.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dapat dikatakan lebih memadai untuk diterapkan. Pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

Dalam permasalahan penelitian menggunakan teori Manajemen Pemerintah Daerah G.R. Terry digunakan sebagai panduan analisa penelitian. Penelitian ini menggunakan narasumber informan sebagai objek informasi yang bertujuan untuk mencapai ketuntasan dalam mendapatkan informasi dalam penelitian ini. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini bahwa dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mengharuskan wilayah Kota memiliki 30% Ruang Terbuka Hijau dari luas wilayah Kotanya tersebut, namun pada kenyataannya Pemerintah Kota Pekanbaru belum dapat memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut. Hal ini dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pemerintah kota terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebagai berikut perencanaan pemerintahan daerah, pengorganisasian kelembagaan pemerintahan daerah, penggunaan sumber-sumber daya pemerintahan daerah (sumber daya aparatur, sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya sosial, keuangan, dan peralatan), pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kata Kunci : Manajemen, pemerintah, Ruang Terbuka Hijau

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pengalokasian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang pengelolaan lingkungan hidup yang selama ini terkonsentrasi di pusat kepada Pemerintah Daerah. Masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di beberapa kota di Indonesia adalah masalah kebersihan (sampah), ketidakterediaan ruang terbuka hijau, pencemaran udara dan air. Oleh karena itu, sejak Desember 2004, Indonesia meratifikasi *Kyoto Protocol*. Tujuan *Kyoto Protocol* adalah untuk mengurangi rata-rata emisi dari enam gas rumah kaca, yaitu karbondioksida, metan, *nitrous oxide*, dan *sulfur heksafluorida*, yang dihitung sebagai rata-rata selama masa lima tahun antara 2008–2012.

Perkembangan Kota yang semakin cepat terutama dalam menyediakan fasilitas seperti perumahan, pendidikan, dan usaha lainnya semakin meningkat permintaan lahan. Perkembangan Kota tersebut dibarengi dengan kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor sehingga kota menjadi tidak sehat yang disebabkan oleh polusi yang dikeluarkan dari hasil pembuangan emisi gas kendaraan bermotor. Meningkatkan beberapa peralatan kebutuhan penduduk dan penambahan jalur transportasi menambah jalur bahan pencemaran dan telah menimbulkan berbagai ketidaknyamanan dilingkungan perkotaan.

Ketidaknyamann ini semakin bertambah dengan kurangnya penghijauan di perkotaan dan kualitas udara yang semakin tidak baik karena berbagai polusi yang telah terjadi karena perkembangan kota. Perkembangan kota yang pesat menyebabkan semakin

sempitnya lahan sehingga masyarakat tidak memiliki tempat untuk berekreasi, bermain dan tempat interaksi social public. Ciri-ciri Kota yang baik adalah memiliki Ruang Terbuka yang dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat namun pada zaman sekarang ruang terbuka kurang diperhatikan ketersediaanya oleh kota-kota lebih mengutamakan pada pembangunan fisik seperti pembangunan gedung-gedung megah dan tinggi.

Secara ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan menurunkan suhu kota tropis yang panas. Bentuk- bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, taman kota, taman hutan kota, tamana botani, jalur sempadan sungai dan lain-lain. Secara sosial budaya keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi social, sarana rekreasi dan sebagai tetenger kota yang berbudaya. Secara arsitektur RTH dapat meningkatkan nilai keindahan kota, kebun-kebun bunga dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota. Sementara itu RTH memiliki fungsi ekonomi, baik secara langsung seperti pengusaha lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian dan pengembangan sarana hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah ataupun sengaja ditanam. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk lingkungan kota yang nyaman dan sehat. Ruang terbuka hijau (RTH) Kota merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi

sebagai kawasan lindung. Kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olah raga, kawasan hijau pekarangan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) diklasifikasikan berdasarkan status kawasan, bukan berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan Pemerintah dalam mewujudkan rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang mencakup ruang darat dan ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Peraturan Pemerintah ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan Ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air. Dilihat dari aspek planologis perkotaan ruang terbuka hijau (RTH) diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) memberikan keserasian

lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Banyak fungsi yang dapat diberikan ruang terbuka hijau (RTH) baik ekologis, sosial budaya maupun estetika yang memberikan kenyamanan dan memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro maupun makro. Manfaat yang diperoleh dari keberadaan ruang terbuka Hijau (RTH) baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung dalam jangka panjang dan bersifat intangible.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) selain sebagai kawasan lindung juga berfungsi sosial sebagai *open public space* untuk tempat berinteraksi sosial dalam masyarakat seperti tempat rekreasi, sarana olahraga dan atau area bermain. Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat. Ruang terbuka hijau bisa berbentuk jalur (*path*), seperti jalur hijau jalan, tepian air waduk atau danau dan bantaran sungai, bantaran rel kereta api, saluran/jejaring listrik tegangan tinggi, dan simpul kota (*nodes*), berupa ruang taman rumah, taman lingkungan, taman kota, taman pemakaman, taman pertanian kota, dan seterusnya.

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pada Kawasan Perkotaan. RTH Berdasarkan Luas Wilayah, penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau (RTH) Publik dan ruang terbuka hijau (RTH) privat.
2. Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;

3. Apabila luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal.

Misi yang dikembangkan pemerintah Kota Pekanbaru saat ini adalah meningkatkan program Ruang Terbuka Hijau dan taman-taman kota di wilayah Pekanbaru, yang menjadi hambatan saat ini adalah pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sehingga membutuhkan lahan sebagai pemukiman yang menyebabkan lahan bagi Ruang Terbuka Hijau dan taman-taman kota menjadi bukan suatu prioritas. Masih banyak kekurangan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru dan ada beberapa kecamatan yang tidak memiliki lahan bagi pembangunan Ruang Terbuka Hijau. Peran Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau berguna menyediakan kawasan hijau kawasan hijau yang dapat menjadi paru-paru kota, menjaga ekosistem lingkungan perkotaan, dan mengimbangi pertumbuhan fisik yang cenderung mempersempit lahan Ruang Terbuka Hijau.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Minimnya ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pekanbaru.
2. Tidak adanya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru mengenai ruang terbuka hijau.
3. Dampak minimnya ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru, terjadinya perubahan fungsi lahan. Hilangnya fasilitas umum yang biasa digunakan oleh warga, salah satu diantaranya adalah hilangnya fasilitas tempat bermain anak (pernyataan Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Ruang (Distako) Kota Pekanbaru)
4. Banyaknya keluhan masyarakat terhadap minimnya ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru, memunculkan problematika, terutama terhadap penggunaan area tertentu sebagai pengganti ruang publik. Misalnya banyak ditemui di pinggir jalan, taman kota atau bundaran air mancur, yang dijadikan tempat bersantai oleh warga (pernyataan Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Ruang (Distako) Kota Pekanbaru).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang ditemui dilapangan yang dikemukakan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan utamadalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana manajemen pemerintah Kota Pekanbaru terhadap ruang terbuka hijau(RTH) di Kota Pekanbaru tahun 2008-2012?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi upaya pemerintahan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru tahun 2008-2012 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi penelitian di atas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekanbaru
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian secara lebih lanjut, terutama dalam meneliti yang berkaitan dengan upaya pemerintah Kota Pekanbaru meningkatkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan instansi terkait yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang upaya pemerintah Kota Pekanbaru meningkatkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

Manajemen Pemerintah Daerah

Pendapat G.R. Terry dalam bukunya *Principles of Management (1980)* **Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art, and followed on order o accomplish predetermined objectives.**

Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-

tindakan

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Merupakan proses pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup perencanaan pemerintahan, pengorganisasian atau kelembagaan pemerintahan dan penggunaan sumber-sumber daya dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan pada tataran pemerintahan daerah (*local government*). Secara umum aspek-aspek Manajemen Pemerintahan Daerah adalah perencanaan pemerintahan daerah, pengorganisasian kelembagaan pemerintahan daerah, penggunaan sumber-sumber daya pemerintahan daerah (sumber daya aparatur, sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya sosial, keuangan, dan peralatan), pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam situasi seperti ini maka metode penelitian kualitatif dapat dikatakan lebih memadai untuk diterapkan. Pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. (Taylor dan Bogdan, 1984:5).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Alasannya dijadikannya Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian ini adalah karena Kota Pekanbaru sangat minim memiliki ruang terbuka hijau, semakin berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH) karena keterbatasan lahan dan ketidakkonsisten dalam menerapkan tata ruang. Berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH) disebabkan oleh konversi

lahan yaitu beralih fungsinya ruang terbuka hijau (RTH) untuk peruntukan ruang yang lain.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis data

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan penelitian, yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa informasi dari wawancara. Dilakukan untuk mengetahui fakta langsung mengenai bagaimana pengelolaan penerangan jalan di kota Pekanbaru.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi atau keterangan sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang sedang diteliti, seperti dokumentasi, arsip, dan keterangan-keterangan lain lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung.

b. Sumber Data

Informan

Dalam menentukan informan ini penulis melakukan dengan cara menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan informan dengan memilih unsur-unsur tertentu saja yang dianggap penting dan yang benar-benar memahami tentang bagaimana pengelolaan penerangan jalan di kota Pekanbaru. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Komisi II DPRD Kota Pekanbaru
2. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.
3. Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.
4. Badan Lingkungan Hidup.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog langsung dengan sumber data, dan dilakukan secara tak berstruktur diman responden mendapatkan

kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan, dan persaaan secara natural.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan atau penijauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hai ini, penelitian dengan berpedoman kepada desain penelitian perlu menguji lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Dengan oservasi kita dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan social yang sukar untuk diketahui dengan metode lainnya. Dari hasil observasi kita akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya.

c. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang". Sehingga penggalian sumber data lewat studi dokumen menjadi pelengkap bagi proses penelitian kualitatif, bahkan guba seperti dikutip oleh Bungin (2007) menyatakan bahwa tingkat kreadibilitas suatu hasil penelitian kualitatif sedikit banyaknya ditentukan pula oleh penggunaan dan manfaat dokumen yang ada. Pengertian dari kata dokumen ini menurut Louis pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan tertulis, dan penjelasan-penjelasan arkeologis. Pengerian kedua diperuntukan bagi surat-surat resmi dan surat Negara seperti surat perjanjian, undangan-undangan, hibah, konsensi, dan lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisi data dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data primer

dan sekunder serta bahan-bahan lain yang dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, kemudian dilakukan analisis secara deskriptif dari keseluruhan data yang diperoleh untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai data dan tabel yang ada untuk dapat selanjutnya menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Manajemen Pemerintah Kota Terhadap Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pekanbaru Tahun 2008-2012

Sampai saat ini pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau masih belum sesuai dengan harapan yakni terwujudnya ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Menurunnya kualitas permukiman di perkotaan bisa dilihat dari kemacetan yang semakin parah, berkembangnya kawasan kumuh yang rentan dengan bencana banjir/longsor serta semakin hilangnya ruang terbuka (*Openspace*) untuk artikulasi dan kesehatan masyarakat.

Sebagai wahana interaksi sosial, Ruang Terbuka Hijau diharapkan dapat mempertautkan seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Aktivitas di ruang publik dapat bercerita secara gamblang seberapa pesat dinamika kehidupan sosial suatu masyarakat.

Ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruangterbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya. Dilihat dari sifatnya ruangterbuka bisa dibedakan menjadi ruang terbuka privat (memiliki batas waktu tertentu untuk

mengaksesnya dan kepemilikannya bersifat pribadi, contoh halaman rumah tinggal), ruangterbuka semi privat (ruang publik yang kepemilikannya pribadi namun bisa diakses langsung oleh masyarakat, contoh Senayan, Ancol) dan ruang terbuka umum (kepemilikannya oleh pemerintah dan bisa diakses langsung oleh masyarakat tanpa batas waktu tertentu, contoh alun-alun, trotoar). Selain itu ruang terbuka pun bisa diartikan sebagai ruang interaksi (Kebun Binatang, Taman rekreasi, dll). Agar manajemen berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang memuaskan dengan meyakinkan bukan saja dipercayai oleh masyarakat, tetapi memang dapat dilaksanakan, G.R. Terry dalam bukunya *Principles of Management (1980) Management* memberikan penjelasan bahwa ada 4 aspek dalam pemerintah daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Perencanaan pemerintahan daerah.
- b. pengorganisasian pemerintahan daerah
- c. Penggunaan sumber-sumber daya pemerintahan daerah (sumber daya aparatur, sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya sosial, keuangan, dan peralatan).
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1. Perencanaan Pemerintahan Daerah.

Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan, rencana harus diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan. Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan (*desecion making*), proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Keputusan-

keputusan harus dibuat pada berbagai tahap dalam proses perencanaan.

Aspek-aspek perencanaan Pemerintah :

1. Dokumen perencanaan
2. Kegiatan yang direncanakan.
3. Proses perencanaan.
4. Tahapan penyusunan perencanaan.

Perencanaan pertama yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru adalah adanya peraturan dan regulasi kebijakan di bidang lingkungan hidup yang khususnya Ruang Terbuka Hijau yang dapat dimaksimalkan menjadi sebuah kekuatan dalam membangun dan menciptakan Ruang Terbuka Hijau yang cukup bagi wilayah Kota Pekanbaru. Namun kenyataannya saat ini peraturan daerah dan regulasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya terlaksana yang disebabkan kurangnya pemahaman dan sosialisasi yang diberikan dinas-dinas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak memahami arti pentingnya Ruang Terbuka Hijau bagi keberlangsungan masa depan kota

2. Pengorganisasian Kelembagaan Pemerintahan Daerah.

Pengorganisasian Kelembagaan Pemerintahan Daerah, sangatlah penting salah satunya adalah sumber dayanya, keterampilan dan kapabilitas yang secara serius dapat menghambat kinerja organisasi. Apabila pengorganisasian kelembagaan organisasi buruk maka, fasilitas tidak memadai, kapabilitas manajemen yang buruk, dan citra organisasi yang buruk dimata masyarakat. Salah satu faktornya yang terdapat ditubuh organisasi yaitu proyek yang ada dan konsep itu sendiri.

Pengorganisasian Kelembagaan yang kurang baik dari internal organisasi adalah kurangnya Sumber Daya Manusia

yang mengakibatkan beberapa program tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan program-program yang telah disusun dan direncanakan sedemikian rupa tidak dapat direalisasikan dikarenakan kurangnya tenaga ahli dalam melaksanakan program-program tersebut dan tidak dapat direalisasikannya beberapa program-program yang sudah berjalan juga, tidak dapat dilakukan secara optimal karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup maka kemungkinan besar rencana-rencana yang telah ditetapkan tidak akan berjalan secara optimal dan juga pelaksanaan dari perencanaan yang telah ditetapkan tidak dapat berjalan secara efektif.

3. Penggunaan sumber-sumber daya pemerintahan daerah (sumber daya aparatur, sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya sosial, keuangan, dan peralatan).

Penggunaan sumber-sumber daya pemerintahan daerah (sumber daya aparatur, sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya sosial, keuangan, dan peralatan), sangat penting dalam sebuah manajemen perencanaan dalam hal Manajemen Pemerintah Kota terhadap Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Pekanbaru ini mendapati kelemahan dalam segi keterbatasan sumber daya dalam bentuk anggaran keuangan. Anggaran keungan adalah salah satu hal yang pokok dalam menjalankan perencanaan di suatu daerah, kerena dengan adanya sumber keungan yang memadai maka akan terciptanyalah program-program yang berjalan dengan lancar, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Apabila sumber dana tidak ada atau tidak terpenuhi maka akan menyebabkan program-program yang telah di rancang untuk meningkatkan Ruang Terbuka Hijau akan menjadi tidak efektif. Salah

satu contoh tidak efektifnya program-program yang di jalankan untuk meningkatkan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Pekanbaru adalah keterbatasan sumber dana, menyebabkan Dinas Pekerjaan Umum tidak dapat menjalankan program pemeliharaan sungai, danau, waduk yang ada di Kota Pekanbaru.

4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenan dengan membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Seperti terlihat dalam kenyataan, langkah awal proses pengawasan adalah sebenarnya langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan kegiatan. Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan peronalia, dan pengarahan dilaksanakan secara efektif.

Seperti terlihat keadaan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Pekanbaru saat sekarang ini sangat kurang sekali dan banyak pepohonan dan taman-taman yang tidak terawat, itu tidak terlepas dari masalah pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota terhadap Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Pekanbaru. Kurang efisiennya pengawasan Pemerintah Kota terhadap Ruang Terbuka Hijau berdampak buruk bagi kelangsungan taman-taman kota yang ada di Kota Pekanbaru. Banyak pepohonan yang tidak dirawat, bunga-bunga sekitar taman yang mati dan tidak terpelihara oleh Pemerintah Kota.

B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Pemeintah Kota Pekanbaru DALAM Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pemerintah Kota Terhadap Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru penulis memakai beberapa indikator, adapun indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya

Salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuan adalah sumber daya manusia. Oleh karena pentingnya manusia dalam organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam segala agenda pemerintahan, suatu organisasi harus memiliki nilai lebih dibandingkan dengan organisasi lainnya, yang dibangun atau dikembangkan melalui proses pembangunan dari SDM itu dapat dipertanyakan, apanya dari SDM itu yang harus dibangun sehingga terwujud manusia seutuhnya atau manusia yang berbobot atau yang berkualitas sesuai dengan hakikat dan sasaran pembangunan nasional Indonesia. Yang perlu dibangun adalah daya yang berasal atau bersumber dari manusia itu ataukah manusia yang menghasilkan daya itu yang harus dibangun atau dikembangkan.

Sumber Daya Manusia yang kualitas Sumber Daya yang baik tidak mungkin suatu proses perencanaan akan berlangsung secara baik. Jumlah tenaga harian lepas yang dipekerjakan di Kota Pekanbaru 150 orang hal ini tentu saja tidak efektifnya perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah, dikarenakan mengingat banyaknya taman kota yang berada di Kota Pekanbaru. Seharusnya Pemerintah Kota Pekanbaru lebih meningkatnya Sumber Daya Manusia

yang ada, agar berjalan efektif perencanaan tersebut dan dapat meningkatnya Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Pekanbaru.

2. Koordinasi

Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Orang yang menggerakkan / mengkoordinasi 9oordi-unsur manajemen untuk mencapai tujuan disebut 9oordinator.

Koordinasi sangat berpengaruh dalam suatu perencanaan yang akan dilaksanakan, salah satu faktor yang penting dalam manajemen perencanaan dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Pekanbaru. Seperti hasil wawancara di atas Dinas Tata Ruang dan Bangunan melakukan koordinasi kepada dinas-dinas terkait, tetapi dilihat dari fakta yang terjadi dilapangan koordinasi yang dilakukan oleh dinas-dinas tersebut masih sangat kurang. Untuk itu Pemerintah Kota Pekanbaru harus lebih tegas kepada instansi-instansi terkait dalam upaya meningkatkan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Pekanbaru.

3. Inovasi

Pengertian menurut Everett.M.Rogers mendefinisikan bahwa *inovasi* adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Dapat diketahui dalam sebuah manajemen perencanaan sangat di butuhkan sekali inovasi, pengenalan hal-hal baru, pembaharuan, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, ini adalah salah satu faktor penentu dari perencanaan peningkatan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota

Pekanbaru. Inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam memanfaatkan lahan-lahan yang ada untu ditanami pohon-pohon dan tanaman hias lainnya untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau, tetapi hal itu hanya saja masih menjadi wacana dari sekian perencanaan yang akan dicanangkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.

4. Sosialisasi

Sosialisasi artinya suatu proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya. Sosialisasi adalah penyampaian informasi dengan melipat gandakan pihak-piha yang terdiri dari individu yang memiliki skala intelektualitas berbeda, sebagai contoh, seorang yang berpendidikan sekolah dasar sangat berbeda sudut pandangnya dengan orang yang duduk di perguruan tinggi suatu universitas dalam menyikapi atau menanggapi sosialisasi tentang sebuah Peraturan Daerah(Perda). Sosialisasi Pemerintah Kota Pekanbaru **tidak** berjalan optimal karena sosialisasi berjalan sekali. Seharusnya sosialisasi dilakukan atau diberikan secara terus menerus dengan ada jangka waktu yang ditetapkan agar mempermudah masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen perencanaan adalah salah satunya sosialisasi, masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat terhadap pentingnya Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru maka akan berdampak pada peningkatan Ruang Terbuka Hijau.

Sosialisasi yang kurang oleh pemerintah akan mempengaruhi manajemen perencanaan, karena sangat kurangnya sosialisasi yang diberikan makan akan menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat yang tidak terlalu optimal dalam pemeliharaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Pekanbaru. Melihat dari fakta yang terjadi di lapangan maka

pemerintah harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya dan manfaat Ruang Terbuka Hijau.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari uraian bab sebelumnya mengenai Manajemen Pemerintah Kota Terhadap Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru Tahun 2008-2012, maka diperoleh kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan sebelumnya dapat diketahui bahwa Manajemen Pemerintah Kota Terhadap Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru Tahun 2008-2012 dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Pekanbaru belum berjalan secara efektif, dilihat dari program-program yang berjalan kurang efektif, tidak memanfaatkan lahan-lahan yang masih kosong di Kota Pekanbaru, dan tidak adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap Manajemen Pemerintah Kota Terhadap Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru Tahun 2008-2012 ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhiyaitu : Sumber Daya Manusia yang kurang memadai yang perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, kurangnya koordinasi antara suatu dinas dengan dinas lain untuk melakukan program peningkatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru, belum maksimalnya inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan Ruang Terbuka Hijau yang baru, kurangnya sosialisasi yang di berikan kepada masyarakat betap aberartinya mempunyai Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga manajemen

perencanaan yang di lakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru belum mencapai hasil yang maksimal atau memuaskan.

B. Saran

Dari Kesimpulan yang telah dijabarkan penelitian maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagaiberikut :

1. Pemerintah Kota Pekanbaru harus lebih memaksimalkan perencanaan dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Pekanbaru, seperti memaksimalkan program-program yang telah dibuat dan membuat program-program baru dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Kemudian Pemerintah Kota Pekanbaru harus lebih memaksimalkan pemanfaatan lahan yang kosong untuk dijadikannya Ruang Terbuka Hijau(RTH), mampu membangun kerjasama yang erat dengan pelaku dibidang usaha untuk meningkatkan dan membangun Ruang Terbuka Hijau
2. Pemerintah harus lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dalam suatu organisasi apabila ingin terwujudnya suatu tujuan yang diinginkan yaitu terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan cara memberikan pelatihan baik tenaga kerja yang baru maupun tenagakerja yang lama agar kualitas tenagakerja yang dimiliki berkualitas yang berdampak pada peningkatan Ruang Terbuka Hijau. Pemerintah juga harus juga menciptakan inovasi baru demi terciptanya Ruang Terbuka Hijau(RTH) yang di idamkan oleh masyarakat Kota Pekanbaru, dan adanya koordinasi yang baik antar dinas-dinas terkait dalam menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang asri, dan salah satu faktor yang juga

sangat penting adalah koordinasi antar pemerintah dengan masyarakat tetang pentingnya Ruang Terbuka Hijau(RTH) yang ada di kota, agar udara di kota tidak tercemar dan menjadi asrinya Kota Pekanbaru dengan terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau(RTH).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo.2011.*Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Graha Ilmu
- Amir, M. Taufiq.2011. *Manajemen Strategi Konsep dan Aplikasi*.Jakarta :PT. Rajagrafindo Persada
- Anonim.2001. *Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru*. Pemerintah Kota Pekanbaru
- Bagong,Suyanto dan Sutinah. 2008. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Pendekatan Alternatif*. Jakarta: Kencana
- Budiharjo, Eko. 2009. *Kota Berkelanjutan*. Semarang: Kencana.
- Gulo. W. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Irwan Z.D. 2005. *Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota*. Jakarta: PustakaCidesindo.
- Morissan.2004. *Pemerintah Daerah UU No.32 Tahun 2004 Beserta Penjelasannya*. Jakarta: Ramdina Prakarsa.
- Pandji,Santosa.2008*Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance..* Bandung: PT Refika Aditama.
- Purnomohadi, Ning. 2006. *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*. Jakarta.

Soemarwoto. O. 1983. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Jembatan Jakarta.

Subagyo. Joko. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Sudantoko. Djoko. 2003. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi offset

Surya,Winarna. 1999. *Otomomi Daerah di Era Reformasi*.Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Sughandy, A, 1989, *Penataan Ruang dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Gramedia.

Tangkilisan. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT.Grasindo

B. Jurnal dan Majalah Ilmiah

- Danoedjo.S, *Menuju Standar Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Kota Dalam Rangka Melengkapi Standar Nasional*
- Dardak. H. A, *Masalah Urbanisasi dan RTH dalam Penataa Ruang Perkotaan*. Jakarta :Dirjen Penataan Ruang Departemen PU.
- Danisworom. 1998. *Makalah Pengelolaan kualitas lingkungan dan lansekap perkotaan di Indonesia dalam menghadapi dinamika abad XXI*.
- Menteri Pekerjaan Umum. 2008. *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan*. Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Rustam Hakim. 2000. *Thesis Analisis Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota DKI Jakarta*, InstitutTeknologi Bandung.

C. Peraturan

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pentaan Ruang.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau.

Peaturan Menteri Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta bentuk dan Tata

Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.

D. Sumber lain

<http://www.menulisproposalpenelitian.com/2011/04/studi-dokumen-dalam-penelitian.html>(diunggahpadatanggal 04 maret 2014)

<http://wwmenlh.go.id/adipura/tentangkit a.php>(diunggahpadatanggal 02 maret2014)

<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admim/jurnal/120889118.pdf> (diunggahpadatanggal04 maret 2014)